

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan berbagai dampak masalah. Dampak masalah yang ditimbulkan seperti pada sektor ekonomi, sosial serta kesehatan. Di sektor ekonomi misalnya: masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan yang diakibatkan karena banyak masyarakat yang mengalami PHK. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat serta kebijakan dirumah saja yang membuat terjadinya pengurangan jam kerja. Banyak industri mengalami kerugian karena hal tersebut yang membuat sebagian besar masyarakat harus terkena PHK untuk mengurangi kerugian yang ada (Maun, 2020, p. 2)

Dampak sosial akibat adanya pandemi COVID-19 yaitu disorganisasi dan disfungsi sosial, tindakan kriminal meningkat, melemahnya sektor pariwisata serta dampak kesehatan yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19 yaitu permasalahan kesehatan mental seperti pembatasan sosial distancing yang dapat menyebabkan kekerasan dalam keluarga, kecanduan dalam penggunaan internet meningkat, kecanduan dalam bermain game (IKA, 2020)

Mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Adanya kegiatan pembatasan masyarakat menyebabkan roda ekonomi berjalan mundur. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada bulan april sampai juni (Kuartal II) mencapai minus 5,32 %, hal ini berbanding

terbalik dengan pertumbuhan perekonomian pada bulan Januari (kuartal I) sebelum berita COVID-19 menyebar di Indonesia, kenaikan ekonomi mencapai 2,97 persen (Rizal, 2020)

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada aspek meningkatnya tingkat pengangguran. Berdasarkan data dari berita harian Kompas bahwa 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh pandemi COVID-19 kemudian 1,77 juta orang dirumahkan atau tidak bekerja sementara 24,03 juta orang menerima pengurangan jam kerja (Aditya, 2021). Permasalahan COVID-19 apabila tidak diselesaikan secepatnya maka tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan adalah kegagalan sistem yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya dan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sadewo et al., 2018, p. 28). Pendapat lain dikemukakan oleh (Ala, 1981, p. 4) bahwa kemiskinan adalah tidak adanya kesempatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memiliki kekuasaan sosial. Dalam hal ini kekuasaan sosial yaitu aset yang dimiliki, seperti tanah, rumah, sumber keuangan, organisasi sosial untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (Ravallion, 1992, p. 4) bahwa kemiskinan dicirikan ketika seseorang tidak dapat mencapai titik minimum kesejahteraan maka seseorang tersebut termasuk masyarakat miskin. Selain itu (Klugman, 2002, pp. 2–3) memberikan pendapat bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu. Faktor rendahnya kualitas seseorang seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan juga menjadi penyebab seseorang

dikatakan miskin.

Masalah Kemiskinan memang bukanlah problem baru yang terjadi di masyarakat. Seringkali masalah kemiskinan menjadi perdebatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai kriteria kemiskinan. Menurut (Girsang, 2011, p. 87) Kemiskinan yaitu suatu keadaan yang biasanya diukur dari kurangnya materi, pangan, sandang serta papan

Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan pandemi COVID-19. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, tingkat penduduk miskin pada bulan Maret sebanyak 9,78 persen dimana hal ini mengalami kenaikan dari pada tingkat kemiskinan yang terjadi pada bulan september 2019 yaitu 9,22 persen.

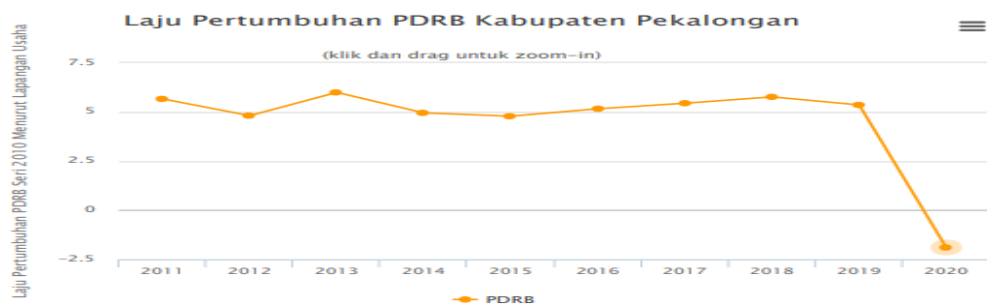
Dampak dari adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat di berbagai wilayah di Indonesia. Selain wilayah Nasional, pandemi COVID-19 juga menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi akibat adanya COVID-19 di tingkat Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, pada Kuartal II 2020, terdapat 3,97 juta penduduk di Jawa Tengah mengalami dampak akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 377 ribu penduduk kehilangan pekerjaan, 273 ribu penduduk tidak memiliki pekerjaan dan 3,19 juta penduduk mengalami pengurangan jam kerja. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,04 persen dari tahun 2019.

Dampak lain dari Pandemi COVID-19 yaitu peningkatan kemiskinan serta pengangguran di wilayah Kabupaten/Kota. Salah satu kabupaten yang mengalami dampak tersebut adalah Kabupaten Pekalongan. Data dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan. Persentase penduduk miskin tahun 2019 tercatat sebesar 9,71 persen sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kemiskinan menjadi 10,19 persen.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 mencapai 4,41 %, tahun 2019 mencapai 4,43 % serta tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 6,97%. Selain menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pekalongan.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan



Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

PDRB yaitu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah (Sasana, 2009: 10). PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja di mana, semakin tinggi nilai PDRB maka nilai barang dan jasa yang dimiliki akan meningkat sehingga perekonomian daerah akan menjadi lebih baik (Laksamana, 2016, p. 10) Tingkat PDRB di daerah berpengaruh pada

tingkat pengangguran atau kemiskinan. Semakin tinggi angka PDRB di daerah maka semakin rendah tingkat pengangguran ataupun kemiskinan tetapi semakin rendah angka PDRB di daerah maka tingkat pengangguran atau kemiskinan yang terjadi di daerah akan mengalami peningkatan

Beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan mengalami dampak akibat penurunan PDRB, salah satunya yaitu wilayah Kecamatan Tirto dimana terjadi peningkatan kemiskinan serta pengangguran masyarakat yang diakibatkan karena proses produksi industri tidak berjalan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan jam kerja masyarakat serta kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk dapat mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19.

industri yang terkena dampak Pandemi COVID-19 salah satunya di Pekalongan yaitu industri batik, dimana Pekalongan sendiri terkenal dengan batiknya maka tidak heran banyak toko batik tersebar di Kota/Kabupaten Pekalongan. Banyak toko batik yang menutup tokonya karena antara biaya sewa dengan pendapatan tidak berimbang, daya beli masyarakat selama pandemi menurun serta banyak toko batik yang lebih memilih berjualan secara online sehingga menyebabkan terjadi pengurangan pegawai sehingga tingkat pengangguran serta kemiskinan mengalami kenaikan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia dalam membantu mengatasi dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi COVID-19 yaitu dengan membuat kebijakan BLT Dana Desa penanggulangan dampak Pandemi COVID-19. BLT Dana Desa yaitu bantuan sosial baru yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang berasal dari

dana desa setempat untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi akibat adanya Pandemi COVID-19. Kebijakan BLT Dana Desa tercantum pada Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 serta PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa.

Hasil pengamatan yang penulis lihat bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 masih terdapat beberapa masalah terutama pada aspek pendataan serta penyaluran. Proses pendataan penerima bantuan dengan melihat data DTKS yang bersumber dari Kementerian Sosial serta data non DTKS dari pemerintahan desa. Data DTKS yang cenderung tidak *update* membuat Relawan Desa harus bekerja dua kali karena harus mencocokkan kembali data dari pemerintah desa untuk mendapatkan data non DTKS yang akurat .

Permasalahan lain yang terjadi yaitu pada proses transparansi data. Banyak masyarakat desa yang seharusnya terdata sebagai penerima bantuan tetapi namanya tidak tercantum sebaliknya banyak juga masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan tetapi namanya terdata sebagai penerima bantuan. Proses pendataan non DTKS yang seharusnya dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan publikasi nama-nama penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan tentang masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Permasalahan lain yang terjadi adalah pada proses penyaluran bantuan. Hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa masyarakat diketahui menerima bantuan BLT Dana Desa sekaligus

bantuan sosial lain.

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi terjadinya permasalahan pendataan serta penyaluran BLT Dana Desa yaitu: (1) Kebijakan baru yang membuat petugas tidak terlatih dan minimnya bimbingan sehingga membuat kapasitas petugas tentang pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa minim; (2) penyaringan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak dilakukan secara seksama; dan (3) data yang tidak update sehingga membuat masyarakat menerima bantuan ganda terjadi.

Permasalahan pendataan serta penyaluran BLT Dana Desa penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 juga terjadi di Desa Pacar dan Desa Dadirejo. Desa Pacar dan Dadirejo yaitu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Rata-rata masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo bekerja sebagai buruh batik dan petani.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak industri batik serta sektor pertanian mengalami masalah. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan larangan untuk mudik membuat penjualan batik menjadi lesu, hal ini membuat banyak masyarakat yang di PHK karena antara pemasukan dengan pengeluaran tidak sebanding. Selain itu banyak pedagang batik sekarang lebih memilih berjualan secara online karena toko, galeri batik sepi pengunjung yang membuat pengurangan jumlah pegawai dan berakibat tingkat kemiskinan meningkat.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2020 angka kemiskinan di Desa Pacar naik dimana tahun 2019 angka kemiskinan mencapai

6,78 % sedangkan tahun 2020 menjadi 7,81 %. Kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan salah satunya karena masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena sepi daya beli masyarakat terhadap batik serta tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 5,87% pada tahun 2019 menjadi 6,89 % pada tahun 2020

Disisi lain Desa Dadirejo selain masyarakat bekerja sebagai buruh industri batik juga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kebijakan pembatasan aktivitas serta kebijakan di rumah saja untuk dapat mengurangi penyebaran COVID-19 menyebabkan kegiatan pertanian mengalami hambatan seperti: petani susah menjual hasil panennya ke pasar, petani susah membeli pupuk, benih serta pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Permasalahan ini akhirnya mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat di Desa Dadirejo pada tahun 2020. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2020 angka kemiskinan di Desa Dadirejo pada tahun 2019 sebanyak 5,78% sedangkan tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 6,89 %. Serta tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,89% pada tahun 2019 menjadi 6,78% pada tahun 2020. Desa Pacar dan Dadirejo merupakan desa dengan karakteristik yang berbeda dimana Desa Pacar adalah desa industri sedangkan Desa Dadirejo adalah desa petani, selain itu Desa Dadirejo merupakan salah satu desa terluas di Kecamatan Tirto dengan kepadatan penduduk yang tidak rame sedangkan Desa Pacar merupakan salah satu desa terkecil di Kecamatan Tirto dengan kepadatan penduduk yang sangat rame membuat pola pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yang ada akan berbeda.



Berdasarkan Permendesdesa Nomor 6 Tahun 2020 pada bagian kriteria penerima bantuan dijelaskan bahwa syarat menerima bantuan BLT Dana Desa tidak boleh terdaftar atau menerima bantuan sosial sebelumnya, hal ini dilakukan supaya menghindari kecemburuan sosial yang timbul dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Selain adanya permasalahan penerimaan bantuan ganda yang diterima oleh masyarakat ada permasalahan lain yang terjadi pada kedua desa tersebut. Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dimiliki oleh kedua desa baik Desa Pacar ataupun Desa Dadirejo. Pelaksanaan PKH memang tidak dilakukan oleh Perangkat Desa, tetapi ditunjuk oleh dinas sosial setempat sebagai pendamping PKH desa tersebut, akan tetapi mengapa pemerintah desa tidak memiliki data cadangan yang penerima PKH di desa tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Penanggulangan dampak pandemi COVID-19 (Studi di Desa Pacar dan Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2020).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan diatas terlihat bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo mengalami beberapa masalah, hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengevaluasi Kebijakan BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Desa Pacar dan Dadirejo. Rumusan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk memahami dan menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan BLT Dana Desa Di Desa Pacar dan Dadirejo Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan BLT Dana Desa ?
3. Apa Saja Manfaat Pemberian BLT Dana Desa Kepada Masyarakat Desa ?
4. Bagaimana Analisis Kritis Pelaksanaan BLT Dana Desa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu memahami secara kritis masalah yang terjadi terhadap pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini nantinya diharapkan akan mendapatkan jawaban:

1. Menganalisis secara mendalam mengenai Keadaan Masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo Pada Saat Pandemi COVID-19 Terjadi.
2. Menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan BLT Dana Desa Di Desa Pacar dan Dadirejo Tahun 2020.
3. Menganalisis secara mendalam mengenai peran pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan BLT Dana Desa.
4. Menganalisis secara mendalam mengenai manfaat pemberian BLT Dana Desa Kepada Masyarakat Desa.
5. Melakukan analisis kritis secara mendalam mengenai pelaksanaan BLT Dana Desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoretis**

Menunjang dan memberikan sumbangan pemikiran pada kasus masalah pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 di Desa Pacar dan Dadirejo. Kajian teoretis dalam penelitian ini adalah mencoba untuk menilai ulang pemikiran William N Dunn terkait Evaluasi Kebijakan serta mengkaitkannya dengan regulasi yang ada.

### **B. Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan lebih lanjut terkait masalah Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Bagi pemerintah diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi permasalahan pelaksanaan bantuan sosial.

## **1.5 TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.5.1 Keaslian Penelitian**

Keaslian riset ini bersumber pada sebagian riset terdahulu yang memiliki ciri yang relatif sama dalam perihal tema kajian, hal yang membedakan pada subjek, jumlah serta posisi variabel riset ataupun tata cara analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Di Desa Pacar Dan Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

Penelitian terkait dan hampir sama tentang bantuan COVID-19 antara lain, efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten

Bojonegoro yang dilakukan oleh Fatkhul Khoiriyah, dkk. Penelitian ini menyimpulkan Program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaruan data (Khoiriyah et al., 2020)

Kesamaan penelitian yang dilakukan Khoiriyah dengan peneliti adalah sama-sama menjelaskan bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan COVID-19, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada topik permasalahan yang diteliti. Khoiriyah meneliti tentang efektivitas bantuan pemerintah, sedangkan peneliti meneliti tentang evaluasi kebijakan bantuan pemerintah pada saat pandemi COVID-19.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anisa Mufida tentang polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terlalu banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan COVID-19 tidak berjalan secara maksimal karena minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah (Mufida, 2020)

Hal yang sama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang permasalahan bantuan COVID-19. Permasalahan terjadi karena adanya penerima bantuan ganda di masyarakat dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada topik permasalahan yang diteliti. Mufida meneliti tentang polemik pemberian bantuan sosial, sedangkan peneliti lebih menekankan pada aspek Evaluasi

### Kebijakan Bantuan COVID- 19.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Regina Wowiling mengenai peran Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai masyarakat pada masa pandemi COVID- 19 di kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian tersebut Regina Wowiling menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai menyebabkan permasalahan timbul di masyarakat. Masih terdapat masyarakat dengan ekonomi tinggi tetapi mendapatkan BLT Dana Desa COVID-19, hal ini bisa terjadi karena masyarakat tersebut memiliki hubungan keluarga dengan aparat pemerintah ataupun pemerintah itu sendiri. Adanya permasalahan ini membuat masyarakat yang memang membutuhkan BLT Dana Desa COVID menjadi tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut (Wowiling, 2022)

Kesamaan penelitian yang dilakukan Wowiling dengan penulis adalah dalam hal ketidaktepatan penerimaan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh wowiling dijelaskan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang dekat dengan pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa COVID -19. Pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa ditemukan ada masyarakat penerima bantuan ganda yaitu Bantuan PKH dan BLT Dana Desa COVID -19.

Kebaruan yang peneliti lakukan dari beberapa penelitian terkait adalah dengan mengkombinasi teori barat yang disampaikan oleh Wiliam N Dunn Tahun

2003 dengan regulasi pemerintah yang mengatur kebijakan pemberian BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yaitu Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan dengan menggunakan enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penggunaan keenam kriteria tersebut sebagai indikator dalam penelitian juga diperkuat oleh pendapat (Nugroho, 2017, p. 536) bahwa evaluasi kebijakan memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi memberikan gambaran terhadap kritik nilai-nilai dari tujuan dan target kebijakan serta evaluasi kebijakan juga memberikan sumbangan terhadap metode-metode, perumusan masalah serta rekomendasi kebijakan yang seharusnya dibuat. Hal ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mempengaruhi seluruh proses kebijakan, sehingga kriteria yang diungkapkan oleh William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan yang dipakai dalam kasus yang sedang peneliti lakukan.

## 1.5.2 Deskripsi Teori

### A. Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Abdoellah, 2016, p. 20) kebijakan dimaknai sebagai menyusun urutan masalah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Menurut (Warnano, 2016, p. 17) kebijakan yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang akan diambil. Dapat

ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa kebijakan publik yaitu suatu strategi yang dipilih oleh pemerintah yang dibuat oleh kelompok atau perseorangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berabagai resiko yang akan terjadi.

## 2. Proses Kebijakan

Menurut (Taufiqurokhman, 2014, p. 16) Proses kebijakan merupakan seluruh aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan bersifat politis dalam kegiatan yang mencakup agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Menurut (Nugroho, 2017, p. 534) proses kebijakan sebagai berikut:

- a. Planning, ditahap ini terjadi perencanaan kebijakan. Dalam perencanaan kebijakan biasanya membahas tentang : (1) isu kebijakan yang terjadi; (2) metode pembuatan kebijakan; (3) aktor pembuat kebijakan; (4) SOP pembuatan kebijakan
- b. Formulasi kebijakan, ditahap ini akan dilakukan pemilihan kebijakan yang sudah ada atau mencari alternatif kebijakan baru untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi
- c. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah atau non pemerintah
- d. Leading, ditahap ini kebijakan publik harus dipimpin. Tugas pemimpin disini adalah pergerakan ( motivasi) dalam melaksanakan kebijakan
- e. Controlling, ditahap ini kebijakan publik dikontrol supaya tidak menjauh dari tujuan yang sudah ditetapkan, meliputi: (1) pemantauan; (2) evaluasi;

dan (3) pengganjaran

## B. Evaluasi kebijakan

### 1. Pengertian Kebijakan

Pengertian tentang kebijakan sangatlah banyak, tergantung dari aspek permasalahan yang terjadi. Menurut (Wibawa, 1994, p. 49) bahwa kebijakan adalah rencana kegiatan yang akan digunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, politik yang sebelumnya mengalami kegagalan. Rencana kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat karena atas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat dikatakan bahwa rencana kegiatan dalam hal ini berupa produk aktif yang dibuat oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan.

### 2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut (Dunn, 2003, p. 22) tahap –tahap kebijakan publik terdiri dari

#### a. Tahap Penyusunan Agenda

Aktor yang memiliki kekuasaan dalam hal ini pemerintah merumuskan masalah pada agenda publik. Problem yang ada dimasukkan ke dalam daftar kebijakan, problem yang terjadi dibahas dan ditentukan mengenai problem yang akan diprioritaskan untuk di selesaikan dengan adanya kebijakan yang akan dibuat.

#### b. Tahap Formulasi Kebijakan

Setelah melakukan penyusun agenda langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh aktor pemegang kekuasaan adalah formulasi kebijakan. Masalah-masalah yang sudah dibahas sebelumnya diberikan usulan



pemecahan masalah oleh para aktor pemegang kekuasaan.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Kebijakan yang ada sebelumnya, akan dipilih untuk di adopsi atau membuat kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan tidak akan pernah bisa digunakan kalau tidak adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Pada tahap implementasi kebijakan akan ada aktor yang diuntungkan dan akan ada aktor yang dirugikan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan berkaitan dengan seberapa pengaruh kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila sudah permasalahan dapat diselesaikan oleh kebijakan yang ada maka kebijakan tersebut dinilai sudah berhasil tetapi apabila kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada atau bahkan memperparah masalah yang ada, maka kebijakan tersebut dinilai gagal.

3. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan yaitu tahapan selanjutnya ketika kebijakan sudah ada dengan maksud dan tujuan yang jelas. Penerapan kebijakan biasanya dilakukan oleh aktor pemegang kekuasaan (pemerintah) kepada masyarakat dalam hal pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan (Gafar, 2009, p. 295)

#### 4. Evaluasi kebijakan

Menurut (Situmorang, 2016, p. 281) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan dimulai dari tahap perencanaan, implementasi serta dampak yang ditimbulkan sedangkan Menurut (Dunn, 2003, p. 608) evaluasi kebijakan mempunyai beberapa karakteristik berikut:

##### a. Fokus nilai

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut bernilai di mata masyarakat. Semakin cepat suatu kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan maka semakin bernilai suatu kebijakan tersebut. Evaluasi digunakan untuk menilai seberapa jauh kebijakan tersebut dapat berjalan.

##### b. Interdependensi fakta nilai

Evaluasi kebijakan harus berdasarkan nilai dan fakta yang terjadi. Untuk menyatakan bahwa kebijakan telah sampai pada tujuan yang ditentukan diperlukan hasil-hasil kebijakan yang telah terjadi sebelumnya. Hasil hasil kebijakan yaitu sesuatu yang dapat memecahkan problem yang ada.

##### c. Orientasi masa kini masa lampau dan masa depan

Evaluasi kebijakan memberikan gambaran mengenai kebijakan yang ada tentang layak atau tidaknya kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dapat digunakan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di masa yang akan datang atau memperbaiki kebijakan-kebijakan lama yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang.

## 5. Fungsi Evaluasi

Kebijakan publik yang ada memang perlu dilakukan evaluasi untuk menilai seberapa berguna kebijakan tersebut. Menurut (Dunn, 2003, p. 609) beberapa fungsi evaluasi yaitu:

- a. Evaluasi memberikan data yang valid tentang seberapa berguna kebijakan tersebut menyelesaikan masalah yang ada.
- b. Evaluasi memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan publik.
- c. Evaluasi memberikan gambaran mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat selanjutnya. Kegagalan kebijakan yang sudah ada dapat diantisipasi sehingga kebijakan yang baru tidak terjadi kegagalan lagi.

## 6. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik diperlukan untuk melihat apakah kebijakan tersebut berguna atau tidak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Menurut (Dunn, 2003, p. 610) terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk dapat mengukur keberhasilan kebijakan yang ada.

**Tabel 1.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan**

NO	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N Dunn (2003: 610)

Kriteria di atas dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan evaluasi kebijakan indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut (Dunn, 2003, p. 429) Efektivitas yaitu langkah yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ketika pelaksanaan kebijakan publik dilakukan dan memberikan dampak yang tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan, maka kebijakan tersebut dianggap gagal atau harus diganti/revisi.

2. Efisiensi

Menurut (Dunn, 2003, p. 430) Efisiensi yaitu jumlah usaha yang dikerjakan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Maka efisiensi selalu berkaitan dengan perhitungan biaya terhadap sesuatu yang dilakukan.

3. Kecukupan

Menurut (Dunn, 2003, p. 430) kecukupan berkaitan dengan tingkat efektivitas dalam memberikan kepuasan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

4. Perataan

Menurut (Dunn, 2003, p. 434) kriteria perataan berkaitan dengan dengan distribusi kebijakan publik secara luas terhadap semua kelompok masyarakat.

5. Responsivitas

Menurut (Dunn, 2003, p. 437) responsivitas yaitu tanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan terhadap kebutuhan, nilai yang

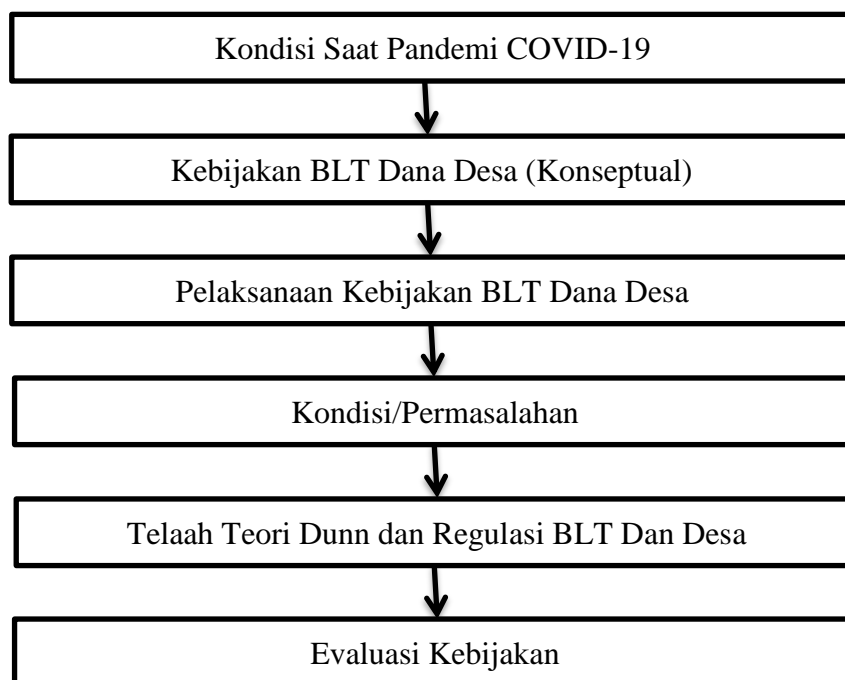
ada di masyarakat.

#### 6. Ketepatan

Menurut (Dunn, 2003, p. 499) ketepatan berkaitan dengan seberapa bernilai kebijakan publik yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

#### 1.5.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



### 1.6 METODE PENELITIAN

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yaitu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dari mulai penentuan topik, pengumpulan data serta menganalisis data sehingga didapatkan suatu pemahaman dari topik, isu tertentu (Raco, 2010, p. 2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tataran analisis

eksploratif. Menurut (Ibrahim, 2015, p. 55) mengemukakan bahwa: Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian sedangkan eksploratif adalah mencari dan menggali lebih dalam tentang hubungan-hubungan baru dari suatu keadaan tertentu (Purba & Parulian Simanjuntak, 2011, p. 17)

#### 1.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Objek penelitian yang diteliti yaitu masyarakat penerima bantuan ganda seperti, BLT Dana Desa serta penerima PKH. Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk menyusun laporan adalah pada bulan Maret 2021 – Januari 2022.

#### 1.6.3 Validasi Data

Menguji keabsahan data terkait evaluasi kebijakan BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan langkah yang dipergunakan adalah mengecek, membandingkan informasi yang diperoleh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan akan pemanfaatan BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo menemukan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu mayoritas di pergunakan untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dialami

Pengecekan derajat kepercayaan atas responden dan beberapa sumber data dengan metode yang sama dilakukan validitas dengan mewawancarai kembali Kepala Desa, Bendahara Desa serta Masyarakat Desa setelah penelitian selesai

dilakukan.

Langkah penyusunan validitas data diperlukan dalam penelitian dengan maksud sebagai pembuktian dan penguatan, bahwa serangkaian data yang diperoleh peneliti sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

#### 1.6.4 Triangulasi Data

Dalam memahami tentang Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil wawancara yang didapatkan dari enam orang pemerintah desa yang terdiri dari tiga orang dari pemerintah desa Pacar dan tiga orang dari Desa Dadirejo yaitu: Kepala desa, sekretaris desa serta bendahara desa. Selain pemerintah desa, peneliti juga mengali informasi dari masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo yang mendapatkan bantuan ganda seperti PKH dan BLT Dana Desa yang terdiri dari enam orang dari masyarakat desa Pacar serta sembilan orang dari masyarakat desa Dadirejo. Sumber data lain yang peneliti dapatkan berasal dari hasil observasi langsung di lapangan serta beberapa jurnal, buku, media online yang terkait dengan masalah evaluasi kebijakan BLT Dana Desa.

#### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Sampel dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif untuk menentukan subjek penelitian menggunakan istilah “Social Situation” (situasi sosial) untuk menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti. Situasi Sosial mencakup tiga unsur yaitu: (1) pelaku (actors) yang merupakan pelaku kegiatan; (2) tempat (place), yaitu tempat kejadian kegiatan; dan (3) aktivitas yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh

aktor ditempat tersebut (Yusuf, 2014, p. 149)

Menurut (Sugiyono, 2016, p. 300) dalam penelitian kualitatif untuk menentukan informan dapat menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling sebagai metode dalam mencari informan yaitu teknik mendapatkan sampel data dengan menetapkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan secara mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

#### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016, p. 264) Teknik Analisis Data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang sudah didapatkan menjadi data yang lebih bermakna untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang disusun secara utuh dan bermakna sehingga mempermudah untuk memahaminya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berfungsi untuk memahami makna tentang adanya sebab dan akibat dari suatu kejadian serta obyek yang sedang diteliti.